

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Keaslian Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tujuan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Kewajiban Notaris	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah ..	18
C. Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) & Aplikasi <i>Gathering Report Information Processing System (Grips)</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	30
C. Cara Pengumpulan Data	31
D. Alat Pengumpulan Data	33
E. Subjek Penelitian	34
F. Jalannya Penelitian	35
G. Analisis Hasil	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Kesesuaian Peraturan Kepala PPATK Pasal 6 Nomor 11 Tahun 2016 Yang Mewajibkan Notaris/PPAT Melakukan Registrasi Grips Untuk Melakukan Pelaporan TKM Dengan Pasal 16 Huruf (f) Undang- Undang Jabatan Notaris dan Pasal 34 Nomor 1 Tahun 2006 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Pengenaan sanksinya	38
1. Kesesuaian dan kewenangan Peraturan kepala PPATK	38
2. Penerapan sanksi administratif pada Pasal 29 ayat 2 peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 terhadap Notaris/PPAT yang tidak melakukan registrasi GRIPS Untuk Melaksanakan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	55
3. Lembaga Pengawas dan Pengaturan (LPP) Jabatan Notaris	59
4. Lembaga Pengawas dan Pengaturan Pejabat Pembuat Akta Tanah ..	62
B. Mekanisme dalam menentukan parameter Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 6 Peraturan Kepala PPATK	63
 BAB V PENUTUP	 81
A. KESIMPULAN	81
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	85